

PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DI DESA BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR

Ni Putu Anik Prabawati^{a, 1}, Ni Wayan Supriyanti^{b, 2}

¹ prabawati@unud.ac.id, ² Supriyanti@unud.ac.id

^{a,b} Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali

Abstract

One of Gianyar Regency's tourist settlements is Blahbatuh Village. In Blahbatuh Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency, this study aims to ascertain the type of collaborative governance in tourism village development. All parties, including the government, society, and other stakeholders, are hoped to benefit from collaborative governance. Descriptive qualitative research methodology was employed in this study. The analysis makes use of collaboration success measures developed by Deseve and collaboration process indicators developed by Ansell and Gash. The findings of this study demonstrate that the Blahbatuh Village administration has established partnerships with several groups, including the commercial sector and the local community, to build the Blahbatuh Tourism Village and boost the local tourism industry and economy. The findings of this study demonstrate that the government of Blahbatuh Village has established partnerships with several groups, including the private sector and the local population, to build the Blahbatuh Tourism Village and boost the local community's economy and tourism. The establishment of the Blahbatuh Tourism Board (BTB), a community-based management organization for the tourism village, is one example of teamwork. The researcher's conclusion is that the Blahbatuh Village Government's Collaboration process, while in line with Deseve's Collaboration success metrics, is nevertheless hindered by the availability of human resources. This study makes the recommendation to increase the actors' level of trust in the program and its objectives. This study makes the recommendation to increase the players' level of trust in the program and its objectives while also forging cooperative linkages in the form of rules.

Keyword: Collaborative, Governance, Tourist Village

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kondisi zaman yang semakin modern. Perkembangan era ini menuntut pemerintah untuk mengubah tata kelola pemerintahan dari Old Public Management menjadi New Public Management dengan Konsep Kewirausahaan. Pemikiran terkait mewirausakan pemerintahan ini disampaikan oleh Osborn dan Gaebler dengan konsep Reinventing Government. Reinventing Government ini memiliki makna lembaga sektor pemerintah menjalankan pemerintahan dengan metode entrepreneurial yaitu dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada namun menggunakannya dengan cara yang baru guna mencapai Efisiensi dan Efektifitas. Terdapat 10 prinsip dalam pengelolaan pemerintah berdasarkan pemikiran Reinventing Government yaitu (1) Pemerintahan katalis, (2) Pemerintahan sebagai milik masyarakat, (3) Pemerintahan yang kompetitif, (4) Pemerintahan yang digerakan oleh Misi, (5) Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, (6) Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan (7) Pemerintah Wirausaha, (8) Pemerintahan yang antisipatif, (9) Pemerintahan Desentralisasi dan (10) Pemerintahan yang berorientasi Pasar.

Dari sepuluh prinsip tersebut terdapat pemerintahan yang katalis dan pemerintahan sebagai milik masyarakat. Maksud dari Pemerintahan katalis ialah pemerintah disini berperan sebagai pengarah suatu program atau kegiatan, sedangkan sebagai

pelaksananya melibatkan sektor lain yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan maupun pelaksanaan program yang lebih efektif dan efisien. Prinsip Reinventing Governance yang lain yaitu Pemerintahan sebagai milik masyarakat yang mana maksudnya peran pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kebutuhan public, sehingga tercipta rasa memiliki bagi mereka sendiri, sedangkan pemerintah bukan sebagai pelayan melainkan hanya sekedar memberikan petunjuk.

Berdasarkan atas kedua prinsip Reinventing Government tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien Pemerintah perlu untuk menjalin kerjasama dengan sektor privat serta masyarakat. Konsep terkait kejasama pemerintah ini dikenal dengan nama Collaborative Governance. Collaborative Governance merupakan perjanjian kerjasama antara pemerintah dan stakeholders non-pemerintah dalam proses pembuatan keputusan kolektif yang bersifat formal, berdasarkan konsensus, dan bersifat deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, manajemen program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008). Menurut Sink dalam Subarsono (2016:177), kerjasama kolaboratif ini juga digambarkan dengan sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara Bersama dalam rangka mencapai tujuan yang tidak dapat mereka capai

secara sendiri. Selain kerjasama dengan sektor privat, pemerintah juga diharapkan dapat menjalankan kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat guna menompang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di daerah terkait. Salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat ialah Pembentukan Desa Wisata.

Desa Wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Menurut Cooper, destinasi wisata harus memiliki empat aspek utama (4A) yaitu *Attraction* (Daya tarik), *Accessibility* (Keterjangkauan), *Amenity* (fasilitas pendukung), dan *Ancillary* (organisasi /kelembagaan pendukung). Keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak. Salah satu desa yang sudah dikembangkan menjadi Desa Wisata ialah Desa Blahbatuh yang berada di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Upaya dalam mempercepat pengembangan Desa Wisata Blahbatuh perlu adanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Keterlibatan antara pihak-pihak tersebut dapat terlaksana melalui praktek *Collaborative Governance*. Aktor-aktor yang terlibat mempunyai peran masing-masing untuk mencapai hasil akhir yang telah disepakati bersama. Kolaborasi yang dilakukan bersama *stakeholder* kerap mengalami kendala ataupun permasalahan khususnya dalam aspek komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* dengan *stakeholder*, pemerintah dengan *stakeholders* maupun masyarakat dengan *stakeholder*.

Pelaksanaan proses kolaborasi pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan desa wisata demi peningkatan ekonomi masyarakat pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan baik, mengingat banyak sekali faktor-faktor baik internal ataupun eksternal organisasi yang membawa masing-masing kepentingan, namun terlepas dari hal tersebut proses kolaborasi harus berjalan dengan komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan bersama, namun dalam hal ini, salah satu permasalahan yang muncul dalam proses kolaborasi yaitu, tidak semua *stakeholder* secara sadar ikut terlibat dan melaksanakan peran serta tanggungjawabnya secara maksimal (Saputra et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk *Collaborative Governance* dalam upaya pengembangan Desa Wisata Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Dwi Alamsyah, dkk (2019) yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Megembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara". Dalam penelitian ini diketahui dalam proses kolaborasi yang dilakukan dalam mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berjalan dengan baik. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmad Sururi (2020) yang berjudul "*Collaborative Governance Actor in the Revitalization Program of Old Banten Religious Tourism Area*". Dalam penelitian ini diketahui kolaborasi program revitalisasi Kawasan Wisata Religi Banten Lama melibatkan kerjasama berbagai pihak yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Badan Cagar Budaya (BPCB).

Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis keberhasilan *Collaborative Governance* menurut DeSeve (Moore,2009) yakni: *Networked Structure* (struktur jaringan), *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan), *Trust Among The Participants* (Kepercayaan), *Governance Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan) *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas), *Information Sharing* (Berbagi Informasi), *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian Kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi-informasi secara deksriptif terkait Pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance*. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2013). Penelitian ini berlokasi di Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pemilihan lokasi berdasarkan atas kondisi yang ditemukan bahwa masih rendahnya pengelolaan desa wisata berbasis kolaborasi. Sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance* di desa Blahbatuh. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pengembangan desa wisata yang efektif dan efisien untuk diimplementasikan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2013). Dimana dalam penelitian ini selalu dilakukan pencatatan dan dokumentasi selama melakukan wawancara, sehingga membentuk suatu kata-kata, ungkapan- ungkapan, tindakan-tindakan yang mencerminkan kegiatan dilapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,

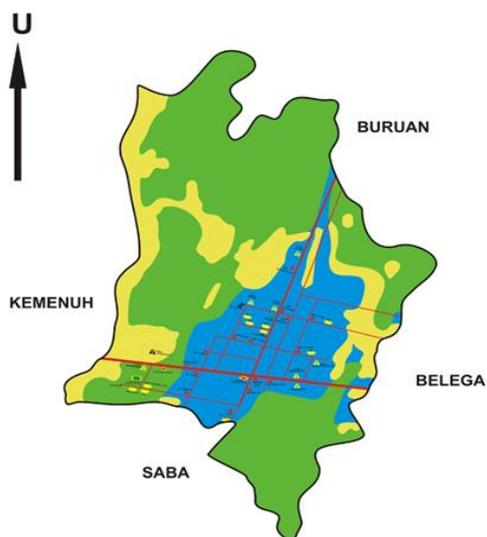
wawancara mendalam, studi Pustaka dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teknik *snowball sampling*. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013). langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, (4) Verifikasi atau penyimpulan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Blahbatuh secara geografis terletak pada 33,3 LS dan 17,5 BT, dan berada pada ketinggian kurang lebih 150 meter di atas permukaan laut. Adapun curah hujan rata-rata pertahun pada data tahun 2003 yang bersumber dari Badan Meteorologi dan Geofisika wilayah Bali adalah sebesar 2.183 mm/tahun dengan kondisi suhu rata-rata antara 22,2°C - 31,6°C. Desa Blahbatuh merupakan salah satu dari sembilan Desa yang ada di kecamatan Blahbatuh, terdiri dari atas 12 Banjar Dinas dan 5 Desa Pakraman dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Di sebelah utara : Desa Buruan
- b. Di sebelah timur : Desa Belega
- c. Di sebelah selatan : Desa Saba
- d. Di sebelah barat : Desa Kemenuh

Gambar 1
Peta Desa Blahbatuh



Sumber : Dokumen Profil Desa Blahbatuh

Pemerintah Kabupaten Gianyar menetapkan Desa Blahbatuh sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Gianyar berdasarkan atas SK Bupati Gianyar Nomor 429/E02/Hukum/2017. Menurut Nuryanti Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung

yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sebagai desa wisata, tentu Desa Blahbatuh memiliki beberapa daya tarik wisata yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung, adapun daya tarik wisata yang dimiliki oleh desa wisata blahbatuh yakni:

Puri Agung Blahbatuh.

Puri Blahbatuh merupakan sentral pariwisata di Desa Wisata Blahbatuh yang berlokasi di Jalan Raya Udayana No. 2 Blahbatuh, kab. Gianyar, Bali. Objek wisata ini berada pada lokasi seluas 4,5 hektare terdiri dari 18 mandala atau bagian. Beberapa di antaranya terdapat bangunan yang disebut dengan tandakan, saren, merajan agung, merajan alit, serta taman air yang biasa digunakan untuk melakukan meditasi. Selain itu, Puri Agung Blahbatuh juga memiliki sejumlah *stage* yang biasa dipergunakan untuk pentas kesenian lokal. Letak lokasi yang strategis dan memiliki nilai budaya yang tinggi membuat Puri Agung Blahbatuh ditetapkan sebagai sentral Pariwisata di Desa Wisata Blahbatuh. Dalam upaya menarik minat wisatawan untuk berkunjung biasanya di setiap bulan purnama diadakan Festival Budaya Fullmoon. Selain sebagai objek wisata, Puri Agung Blahbatuh dipergunakan sebagai tempat ibadah serta tempat edukasi kepada Masyarakat umum.

Gambar 2
Puri Agung Blahbatuh



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 3
Puri Agung Blahbatuh



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Cagar Budaya Pura Puseh Gaduh

Cagar Budaya Pura Puseh Gaduh merupakan situs budaya yang berada di Jalan Kebon Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Di dalam Pura Puseh Gaduh Blahbatuh terdapat arca yang disebut "Kepal Kebo Iwa", yang dianggap masyarakat sebagai representasi wajah Kebo Iwa, yang memiliki makna filosofis bahwa baik dan buruk selalu berasal dari kepala.

Gambar 4
Cagar Budaya Pura Puseh Gaduh



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 5

Cagar Budaya Pura Puseh Gaduh



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Vihara Amurva Bhumi,

Objek wisata ini berlokasi di Jl. Wisma Gajah Mada No.51, Blahbatuh, Gianyar, Bali. yang merupakan tempat persembahyangan umat buddha. Tempat ini menjadi salah satu daya tarik wisata karena Vihara ini dibangun di tebing Sungai Petanu, sehingga memiliki pemandangan yang menarik dengan perpaduan antara keindahan alam dan arsitektur Vihara. Berdekatan dengan Vihara Amurva Bhumi juga terdapat jembatan gantung yang merupakan peninggalan penjajahan belanda yang biasa menjadi spot foto yang menarik bagi para wisatawan.

Cagar Budaya Pura Dalem Maya,

Cagar budaya Pura Dalem Maya ini berlokasi di Jl. Wisma Gajah Mada, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Pura Dalem Maya didirikan pada tahun Saka 1197/1275 Masehi oleh Kebo Waruga Bersama pasukan Taruna Watu. Selain menjadi tempat persembahyangan Masyarakat setempat, pura ini juga merupakan cagar budaya yang menyimpan berbagai peninggalan pada jaman bali aga yaitu bukti perjalanan hidup sang maha patih Ki Kebo Iwa dan sebagai tempat penyimpanan Batu Api yang didapatkan oleh Kebo Iwa di Pura Uluwatu.

Potensi kesenian dan kerajinan.

Desa blahbatuh terkenal dengan penghasil kerajinan yaitu Gamelan bali, tenun ikat, ukiran dan pande besi. Salah satunya bernama Sidha Karya Gong/Gambelan yang masih eksis hingga saat ini. Gamelan bali biasanya digunakan sebagai pengiring upacara keagamaan maupun atraksi kesenian baik itu kesenian yang bersifat sacral maupun hiburan. Selain potensi di bidang kerajinan, desa wisata blahbatuh juga memiliki potensi bidang kesenian yaitu terdapat Sanggar Tari Windu Candhra Budaya yang

merupakan wadah pelestarian tari bali dan atraksi wisata bagi wisatawan.

Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Blahbatuh

Dalam mencapai keberhasilan tujuan Desa Wisata Blahbatuh tentu pemerintah desa tidak dapat berjalan sendiri, perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan masyarakat maupun sektor privat yang ada di lingkungan dengan Blahbatuh. Adapun bentuk kolaborasi yang dilakukan pemerintah Desa Blahbatuh berdasarkan indikator teori Collaborative Governance Menurut Deserve yakni:

Networked structure

Networked structure ini berkaitan dengan struktur jaringan yang dibangun untuk memperjelas kedudukan, tupoksi maupun garis koordinasi antara satu unit dengan unit lainnya. Struktur jaringan dalam suatu proses kolaborasi pemerintah sebaiknya berbentuk vertical dimana antar pemerintah dengan stakeholder memiliki kesetaraan kedudukan berdasarkan tupoksinya masing-masing sehingga tidak adanya dominasi maupun monopoli dalam proses kolaborasi tersebut. Dalam pengembangan Desa Wisata tentu sangat diperlukan kolaborasi lintas sectoral, karena tanpa adanya dukungan dari Masyarakat maupun sektor swasta akan sulit untuk mengembangkan Desa Wisata. Dalam kolaborasi pengembangan desa wisata blahbatuh Pemerintah desa blahbatuh selaku leading sektor menjalin Kerjasama dengan Masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah desa memiliki tugas dalam perumusan kebijakan dan penganggaran pengembangan desa wisata. Untuk meningkatkan efektifitas dalam pengembangan desa wisata, pemerintah desa Blahbatuh membentuk sebuah unit organisasi berbasis Masyarakat yang disebut dengan Blahbatuh Tourism Board (BTB). Struktur Organisasi Blahbatuh Tourism Board (BTB) terdiri dari Ketua, Sekretaris beserta jajarannya. Tugas dari BTB ini yaitu mengelola desa wisata serta Menyusun program menarik yang dapat meningkat daya Tarik serta kunjungan wisatawan ke desa wisata blahbatuh. Sedangkan sektor swasta membantu dalam promosi desa wisata, dimana sektor swasta yang dimaksud ialah para pelaku usaha di sektor pariwisata seperti pemilik travel, guide, serta pemilik usaha kerajinan. Penguatan kelembagaan antara stakeholder dibangun dengan cara rapat koordinasi yang dijalankan, namun intensitas dari rapat koordinasi masih kurang karena kesibukan dari masing – masing stakeholder. Selain itu belum tersedianya MoU maupun perjanjian yang memperkuat kelembagaan dari segi hukum.

Governance

Governance yang dimaksudkan dalam collaborative governance ialah berkaitan dengan kejelasan peran dari masing-masing tokoh serta aturan-aturan yang harus dituruti bersama dalam

proses kolaborasi. Terdapat tiga aspek dalam governance yaitu Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Pertama dari segi partisipasi, Pemerintah desa blahbatuh telah memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata, hal tersebut tercermin dari pembentukan Blahbatuh Tourism Board sebagai bentuk pemberdayaan Masyarakat dalam mengembangkan desa wisata blahbatuh.

Kedua dilihat dari segi transparansi, pemerintah desa blahbatuh cukup transparan dalam menyampaikan ketersediaan sumber daya dalam menunjang pengembangan desa wisata kepada para stakeholder. Sehingga keterbukaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh BTB maupun stakeholder yang lain dalam penyusunan program penunjang pengembangan desa wisata sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan serta sumber daya alam yang potensial.

Ketiga, Dilihat dari segi akuntabilitas yaitu adanya penyampaian pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder melalui laporan serta rapat rutin yang dilaksanakan.

Commitment to a common purpose

Komitmen terhadap tujuan ini mengacu pada kesadaran dari seluruh pihak terhadap tujuan yang ingin dicapai Bersama dalam proses kolaborasi ini. Sehingga diharapkan dengan adanya kesadaran ini dapat menumbuhkan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tupoksinya masing-masing. Upaya untuk menumbuhkan komitmen dalam dilakukan melalui sosialisasi untuk memberikan pemahaman terhadap para stakeholder terkait alasan akan pentingnya pelaksanaan program ini serta keuntungan yang dapat mereka rasakan apabila tujuan dapat terealisasi. Dalam kolaborasi Pengembangan Desa Wisata Blahbatuh pemerintah maupun stakeholder belum memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan desa wisata. Hal ini dilihat dari belum adanya upaya yang masif dalam hal penguatan pemahaman untuk membangun kesadaran para stakeholder untuk menjalankan tupoksinya dengan optimal. Sehingga menyebabkan yang aktif dalam proses kolaborasi ini hanya beberapa tokoh saja, sedangkan tokoh-tokoh lainnya masih terkesan abai dalam menjalankan tugas karena kurangnya pemahaman dan kesadaran yang mereka miliki.

Trust among the participants

Kepercayaan antar stakeholders dinilai dari adanya rasa percaya antar actor-aktor dalam proses kolaborasi ini. Dimana kepercayaan ini dibangun dari transparansi dan profesionalitas dalam menjalankan kinerja. Dalam pengembangan desa wisata blahbatuh, Pemerintah desa blahbatuh mempercayai Blahbatuh Tourism Board untuk mengakomodir objek dan atraksi wisata di desa blahbatuh. Dimana dalam menjalankan desa wisata BTB diberi dukungan dana oleh pemerintah desa untuk melancarkan

pelaksanaan program. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan koordinasi dengan para UMKM lokal dan memberikan kepercayaan serta ruang dalam menciptakan produk-produk yang kreatif dan inovatif yang mendorong wisatawan untuk berkunjung.

Access to authority

Akses terhadap otoritas dilihat dari tersedia Kewenangan bagi stakeholder untuk menjalankan keputusan maupun program – program yang mereka susun. Dalam mengelola desa wisata Blahbatuh Tourism Board di buatkan Surat Keputusan pembentukan tim Blahbatuh Tourism Board (BTB). Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan BTB tersebut, BTB memiliki kewenangan untuk menjalankan program, kegiatan maupun mengalokasikan sumber daya untuk mewujudkan pengembangan desa wisata.

Distributive accountability/responsibility

Pembagian akuntabilitas dan responsibilitas merupakan indikator yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban dan daya tanggap dari seluruh aktor terhadap tupoksi yang mereka jalankan. Setiap stakeholder memiliki tanggungjawab masing-masing yang harus mereka laksanakan dan laporkan hasil kinerja mereka masing-masing. Dengan adanya pembagian tanggungjawab ini diharapkan agar para aktor dapat berkerja secara optimal. Dalam pengembangan desa wisata blahbatuh sudah ada pembagian tanggung jawab. Pemerintah desa selaku leading sector bertanggung jawab dalam proses pembuatan keputusan, penganggaran dan monitoring evaluasi. Kelompok Masyarakat yaitu Blahbatuh Tourism Board memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan mengimplemetasikan program-program kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan daya Tarik wisata. Sedangkan para pelaku usaha UMKM bertanggung jawab untuk membuat produk keatif dan khas dari daerah tersebut. Para pelaku usaha travel memiliki tanggung jawab untuk melakukan promosi pariwisata dan mengajak wisata untuk berkunjung ke objek wisata di desa wisata blahbatuh. Dapat dilihat bahwa masing-masing aktor telah memiliki tupoksi dan tanggungjawab masing-masing sehingga tidak saling tumpang tindih satu sama lain.

Information Sharing

Penyebaran informasi kepada seluruh pihak yang menjalin kolaborasi sangat penting dilaksanakan. dimana informasi yang disampaikan dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan serta dengan adanya keterbukaan informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan aktor dalam proses kolaborasi. Penyampai informasi yang baik dapat menunjang pencapaian tujuan secara optimal. Penyampaian informasi dalam proses kolaborasi pengembangan desa wisata ini dilakukan melalui rapat rutin serta group di social media. Sebelumnya rutin dilakukan rapat koordinasi, Namun selama

pandemi intensitas koordinasi menjadi terbatas, sehingga terlihat forumnya pasif. Selain itu penyebaran informasi terkait desa wisata blahbatuh ke masyarakat luas belum optimal.

Access to resources.

Indikator access to resources ini berkaitan dengan pemberian wewenang kepada para aktor untuk mengakses ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia, keuangan maupun sarana prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Dalam hal ini, Pemerintah desa blahbatuh memberikan akses kepada BTB untuk mengakses Sumber daya yang ada dalam mendukung pengembangan desa wisata. Terkait dengan sumber pendanaan, pemerintah menganggarkan sejumlah dana untuk dikelola oleh BTB. Namun anggaran yang tersedia masih terbatas untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Sedang terkait sumber daya manusia dan sarana prasarana pemerintah desa memberikan akses untuk menggunakan sarana publik yang tersedia untuk menyelenggarakan kegiatan festival maupun aktivitas promosi lainnya.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa blahbatuh sudah menerapkan pola kolaborasi sesuai dengan Indikator Collaborative Governance oleh Deserve, namun belum sepenuhnya optimal karena masih terkendala sumber daya manusia Blahbatuh Tourism Board (BTB) yang jumlahnya terbatas, sehingga upaya pengembangan untuk mewujudkan tujuan Desa Wisata Blahbatuh memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun hambatan yang dihadapi dalam menjalankan proses kolaborasi ialah pertama adanya ego sektoral yang mana masing-masing sektor tentu ingin mendapatkan keuntungan dalam kolaborasi ini, apabila salah satu sektor merasa tidak diuntungkan maka akan menyebabkan keengganan dalam menjalankan tupoksinya. Kedua, belum kuatnya dasar hukum yang dimiliki dalam menjalankan proses kolaborasi yang menyebabkan kurang kuatnya kemauan untuk menjalankan tupoksi maupun mencapai target kolaborasi. Ketiga, terkait dengan anggaran yang masih terbatas yang menjadi hambatan dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

Saran

Berkaitan dengan penelitian diatas terdapat beberapa saran yang peneliti berikan untuk mengatasi hambatan yang ada, yakni sebagai berikut: Membangun kepercayaan seluruh actor yang terlibat nantinya dalam proses kolaborasi melalui penguatan pemahaman seluruh actor terkait mekanisme

maupun tujuan dari program yang dijalankan, Perlu adanya kemauan dan kesungguhan dari pemimpin dalam memfasilitasi kegiatan kolaborasi ini melalui membuka wadah bagi masyarakat maupun sektor swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah, Memperkuat ikatan kolaborasi dengan

adanya dasar hukum yang mengatur seperti pembuatan Memorandum of Understanding (MoU)

DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 04(02), 112-127. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik>
- Sastrawan, I. G. A., Paturusi, S. A., & Arida, N. S. (2017). *Evaluasi Pengembangan Potensi "Ancient Track One" Dengan Model CIPP Di Desa Wisata Bedulu Dan Desa Buruan Kabupaten Gianyar*. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA). <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2017.v04.i02.p10>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Saputra, P. R., Lendra, I. W., Destriilia, I., & Wahyuni, F. (2022). *Administratio: Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif Lampung dalam Perspektif Collaborative Governance*. 13(1), 33-48. <https://doi.org/10.23960/administratio.v13i1.278>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Sururi, A. (2020). Collaborative Governance Actor in the Revitalization Program of Old Banten Religious Tourism Area. *Policy & Governance Review*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i2.216>